



**DE-SOEKARNOISASI  
DALAM WACANA RESMI ORDE BARU:  
Kilas-Balik Praktek-Praktek Rekayasa Kebenaran dan  
Wacana Sejarah Oleh Rejim Orde Baru\***

Oleh: Agus Sudibyo\*\*

**Abstract**

*New Order regime under Soeharto carried various ways out in order to weaken its rival's position. One of them is symbolical way, by using its formal discourses to create illegitimate and unfavourable construction on its rivals. This symbolical one is also applied to Bung Karno, the first President of Indonesia. Instead of less effectively legal-formal mechanisms to erode Bung Karno's influences, they delegitimated Bung Karno's in symbolical contex. This article looks that delegitimation practices to Bung Karno, or De-Soekarno-ization, is not only conducted on the level of manifest, for example by swept away Soekarno's loyalists from bureaucracy and military, but also on the level of symbolical-latent by negating and denying Bung Karno's historical roles and contributions. It occured in textual education books and government medias and on the various debate in mass media when apparatuses of New Order regime discredited Bung Karno.*

**Pendahuluan**

Selama 32 tahun berkuasa di Indonesia, rejim Orde Baru sebenarnya juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan rongrongan. Namun realitas menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Soeharto, rejim Orde Baru senantiasa berhasil mengatasi konflik politik, gerakan separatisme, eskalasi

---

\* Tulisan ini merupakan bagian dari Bab IV skripsi penulis yang berjudul "Bung Karno Dalam Wacana Media massa Orde Baru: Analisis Terhadap Berita-berita tentang Bung Karno dalam Majalah Tempo dan Majalah Editor Edisi Januari 1987-Juni 1994, dengan Pendekatan Framing", Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol, UGM, 1998.

\*\* Alumnus jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Yogyakarta.

kritisisme kelompok intelektual dan persoalan-persoalan krusial lain yang muncul dalam kehidupan bernegara. Melalui berbagai cara, Soeharto berhasil memperkokoh kekuasaannya serta mempertahankan legitimasi rakyat terhadap pemerintahannya hingga akhirnya terjadi peralihan kekuasaan pada 21 Mei 1998.

Selama berkuasa, rejim Soeharto menggunakan dua cara untuk menyingkirkan atau memperlemah posisi lawan-lawan politiknya. Cara yang pertama bersifat manifes, yakni cara-cara yang dijalankan melalui mekanisme legal-formal, perangkat-perangkat hukum yang manipulatif-koopatif, serta represi-represi fisik yang prosedural. Gerakan separatisme di Aceh, Timor-Timur dan Irian Jaya dihadapi dengan kekerasan militer, demikian juga kelompok agama dalam kasus Tanjung Priok dan kasus Lampung. Kehidupan pers, gerakan buruh dan kelompok kritis mahasiswa/intelektual dikontrol dengan rekayasa perangkat-perangkat hukum, represi fisik maupun intimidasi psikologis. Rejim Soeharto juga memenjarakan, menculik bahkan melenyapkan sejumlah aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Pengaruh politik Megawati Soekarno Putri berusaha dilenyapkan dengan mekanisme legal-formal (Kongres PDI Medan) dan kekerasan fisik (peristiwa 27 Juli 1996).

Cara yang kedua bersifat laten-simbolik. Soeharto melakukan praktek-praktek delegitimasi terhadap lawan politiknya dengan memproduksi dan memanipulasi wacana-wacana resmi, yang difungsikan sebagai sarana produksi kebenaran "versi" negara. Representasi wacana resmi ini berupa buku teks pendidikan, surat-kabar, majalah, jurnal, buku putih dan film yang diproduksi instansi-instansi pemerintah. Wacana resmi negara juga tergambar dalam pernyataan para aparatnya yang terlibat dalam berbagai perdebatan di media massa. Dalam produk-produk wacana resmi negara inilah rejim Soeharto menciptakan gambaran-gambaran yang *unfavourable* dan *illegitimate* tentang lawan-lawan politiknya.<sup>1</sup> Gambaran ini tercipta melalui

<sup>1</sup> Soeharto menciptakan gambaran yang negatif tentang kelompok-kelompok kritis mahasiswa/intelektual dengan mengintrodusir label-label OTB (organisasi tanpa bentuk), "kelompok kekin-korian", kelompok anti kemapanan, agen asing, kelompok radikal, mengasosiasikannya dengan komunisme atau Marxisme, serta dengan menggambarannya sebagai pengancam integrasi nasional. Gambaran yang negatif juga diciptakan untuk kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah yang kecewa dengan dan berusaha memisahkan diri dan pemerintah pusat dengan memperkenalkan label GPK (gerakan pengacau keamanan), kelompok ekstrem, kelompok disintegrasi, dan lain-lain. Gambaran-gambaran yang demikian ini tak pelak menimbulkan image tabu, *violent*, patologis, dan akhirnya *illegitimate* tentang lawan politik Soeharto.

operasionalisasi dimensi-dimensi wacana: sintaksis, semantik, retorika, skematik, grafik dan lain-lain dalam ranah tekstual.

Tulisan ini hendak menganalisis praktek delegitimasi yang dilakukan rejim Soeharto terhadap Bung Karno melalui berbagai representasi wacana resminya. Praktek delegitimasi terhadap diri Bung Karno dan berbagai *discourse* yang terbentuk tentang dirinya adalah contoh yang sangat bagus tentang bagaimana rejim Soeharto menggunakan cara-cara laten-simbolik untuk melenyapkan pengaruh dan legitimasi lawan politiknya. Delegitimasi dalam dataran simbolik terhadap Bung Karno dilakukan dalam skala yang relatif besar, melibatkan unsur-unsur pemerintahan yang sangat beragam dan dalam periode waktu yang cukup panjang.

## Kerangka Teoritis

### a. Perspektif Kuasa—Pengetahuan Foucault

Pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal-balik. Penyelenggaraan kekuasaan yang terus-menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, sebaliknya, penyelenggaraan pengetahuan akan selalu menimbulkan kekuasaan.<sup>2</sup> Demikian bunyi dalil kuasa-pengetahuan Michel Foucault. Kekuasaan di sini diasumsikan tidak dapat terpusat pada suatu tempat atau suatu pihak. Kekuasaan terbentuk dan terorganisir secara sangat rapi sehingga membentuk semacam jaringan. Oleh karena itu, kekuasaan harus diperlakukan dan dianalisis sebagai sesuatu yang beredar, sesuatu yang berfungsi secara berantai.

Jalinan kekuasaan dan pengetahuan begitu kuatnya sehingga menurut Foucault mustahil kekuasaan terselenggara tanpa beroperasinya entitas pengetahuan. Sebaliknya, mustahil pula beroperasinya entitas pengetahuan tidak menghasilkan efek kuasa. Pemikiran ini, seperti yang disimpulkan

<sup>2</sup> Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, diedit oleh Colin Gordon (New-York: Pantheon Books, 1980): hal. 98.

Aditjondro<sup>3</sup>, menimbulkan konsekuensi bahwa kondisi suatu kekuasaan juga harus diselidiki dari produk-produk pengetahuan yang dimunculkan oleh kekuasaan itu yang terangkum dalam suatu ranah: wacana. Hubungan-hubungan kekuasaan yang terbentuk dan menjadi ciri struktur suatu masyarakat tak dapat disusun, dimapankan dan diwujudkan tanpa pemfungsian, pendistribusian dan pemapanan wacana tertentu. Penyelenggaraan kekuasaan mensyaratkan adanya, apa yang diistilahkan Foucault sebagai, *ekonomi wacana kebenaran* yang beroperasi berdasarkan jalinan antara pengetahuan dan kekuasaan. Masyarakat lazimnya ditundukkan untuk menjamin terciptanya kondisivitas bagi proses produksi ekonomi wacana kebenaran.<sup>4</sup>

Dalam konteks yang sama, penguasa-penguasa modern ternyata menyandarkan kekuasaannya pada suatu "ekonomi-politik kebenaran". Ekonomi politik kebenaran mempunyai ciri-ciri: kebenaran berpusat pada bentuk wacana ilmiah serta institusi-institusi yang memproduksinya; gairah pada kebenaran tunduk pada perubahan ekonomi dan politik yang terus-menerus; kebenaran merupakan objek dari distribusi dan konsumsi yang besar-besaran (beredar melalui aparat-aparat pendidikan dan informasi, dengan daya cakup yang luas dalam struktur sosial yang bersangkutan, meskipun ada berbagai pembatas yang ketat); kebenaran diproduksi dan didistribusikan di bawah kontrol segelintir apparatus ekonomi dan politik dominan (universitas, militer, media); kebenaran juga merupakan sasaran dari serangkaian perdebatan politik dan konfrontasi sosial (arena pertempuran-pertempuran ideologis).<sup>5</sup>

### b. Wacana dan Praktek Delegitimasi

Perspektif kuasa-pengetahuan menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan secara kontinyu membutuhkan sekaligus juga menghasilkan pengetahuan-pengetahuan resmi atau "kebenaran versi negara". Efek-kuasa yang dihasilkan oleh pengetahuan adalah dalam domain simbolik-laten. Ia

<sup>3</sup> Aditjondro, George J., "Pengetahuan-Pengetahuan Lokal Yang Tertindas: Menempok Gerakan Lingkungan di Indonesia Melalui Konsep "Kuasa/Pengetahuan," Foucault," *Kalam*, edisi 1, 1994, hal. 59-60.

<sup>4</sup> Foucault, *op. cit.*, hal. 93

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 131-132. Lihat pula Aditjondro, *op. cit.*, hal. 60

terwujud dalam berbagai representasi wacana (buku, media-cetak, film, pidato, dan lain-lain) dan merupakan hasil dari praktek-praktek diskursif (implementasi dan operasionalisasi dimensi-dimensi wacana untuk menghasilkan image, citra dan efek-efek tertentu dalam presentasi tekstual maupun lisan).

Kebenaran versi negara dalam tulisan ini dibahas dalam konteks legitimasi-delegitimasi dan secara garis-besar dapat terangkum dalam praktek penggambaran diri-negara secara positif (*positive self-presentation*) dan praktek penggambaran pihak lain — lawan dari negara — secara negatif (*negative other-presentation*).<sup>6</sup> Legitimasi dan delegitimasi adalah aksi sosial kompleks yang dapat dilakukan atau diperkuat dengan percakapan dan teks komunikasi. Seperti yang dijelaskan van Dijk, keduanya sama-sama bersifat diskursif, dan mampu membuktikan bahwa melalui kegiatan persuasi, suatu wacana dapat menghasilkan efek perubahan format perilaku dan ideologi utama suatu kelompok.<sup>7</sup> Jika kelompok-kelompok alternatif dapat dikontrol dan didelegitimasi melalui wacana, kelompok dominan dapat memperkuat hegemoninya dengan menguasai domain simbolik, yaitu kontrol terhadap makna dan pikiran partisipan wacana.

Strategi delegitimasi dalam level wacana biasanya dilakukan ketika perangkat-perangkat koersif, represif, dan mekanisme legal lainnya tidak efektif untuk memarjinalisasi wacana alternatif.<sup>8</sup> Strategi delegitimasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara.<sup>9</sup> *Pertama*, dengan memfokuskan pada konteks produk, akses, dan penggunaan wacana. Cara ini dapat dilakukan dengan menggugat terhadap legitimasi anggota kelompok lain — biasanya dilakukan oleh kelompok dominan terhadap para juru bicara kelompok terdominasi, serta dengan merendahkan peran, latar belakang, visi, pengetahuan, konsep, dan harapan-harapannya. Awak media dapat berperan dalam level ini dengan menghalang-halangi akses kelompok *illegitimate* ke media massa, atau dengan merepresentasikan pihak-pihak tertentu sebagai sumber berita yang *unreliable*.

<sup>6</sup> Teun A. van Dijk, "Legitimacy", *Ideology: A Multidisciplinary Study* (London: Sage, 1998, in Press), hal. 5.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 6-7

Kontrol ideologis yang efektif terhadap kelompok terdominasi adalah ketika kelompok dominan mampu mempengaruhi pikirannya melalui mekanisme yang diistilahkan van Dijk sebagai "interiorisasi" kepercayaan, sikap dan ideologi dominan. Contohnya adalah yang sering terjadi dalam domain kelas, gender atau ras, di mana kelompok terdominasi secara terus-menerus diserang dengan wacana kelompok dominan atau pemerintah, hingga akhirnya tumbuh kesadaran pada kelompok terdominasi itu bahwa mereka memang inferior, pinggiran dan *illegitimate*.

*Kedua*, ketika akses kelompok alternatif atau terdominasi ke wacana publik tidak dapat dihalang-halangi, delegitimasi terhadapnya dapat dilakukan dengan pembahasan di luar konteks, pemfokusan terhadap simptom-simptom negatif atau destruktif pada diri kelompok terdominasi, penekanan terhadap ketidakselarasannya dengan nilai-nilai umum. Serta dengan mengimplementasikan strategi *framing* yang spesifik, misalnya dengan pendeskripsian secara negatif terhadap kelompok lain (militan, radikal, komunis dan lain-lain). Delegitimasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan tokoh yang otoritatif dan *legitimate* untuk membuat klarifikasi, evaluasi moral dan dakwaan-dakwaan terhadap kelompok minoritas sesuai terjadinya keributan politik.

*Ketiga*, delegitimasi terhadap wacana kelompok terdominasi juga dapat difokuskan pada beberapa kemungkinan efek wacana. Misalnya, dengan memprogramkan penyiaran pada jam-jam siaran yang tidak efektif (media televisi), pemuatan pada halaman tengah, belakang, atau pada sisi halaman yang kurang menarik (surat-kabar dan majalah), menghambat proses pengudaraan (radio), mempersulit distribusi media yang dianggap radikal, menghalangi masyarakat untuk mengikuti forum-forum diskusi dan lain-lain.

Praktek-praktek delegitimasi wacana alternatif ternyata terjadi pula dalam realitas sistem demokrasi yang mengedepankan kebebasan berbicara. Hal ini secara esensial terlihat pada beberapa hambatan yang dialami kelompok alternatif untuk mengakses ke wacana media, ke forum perdebatan yang *fair*, serta khususnya ke pikiran khalayak. Dalam kata-kata van Dijk, "In social, political and ideological conflict and crisis, it is vital that members of the ingroup, or member of allied and neutral groups not be 'infected' by the ideo-

*logical virus of the opponents.*"<sup>10</sup> Menjadi sangat problematis ketika disadari bahwa delegitimasi terhadap wacana alternatif dengan cara-cara yang manipulatif itu mempersulit konstruksi ideologi alternatif, serta menghambat proses komunikasi dan persuasi yang *fair* dan seimbang.

Delegitimasi dalam ranah simbolik ternyata bukan hanya menghasilkan *establishment* suatu kekuasaan, tetapi juga dapat merefleksikan praktek dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>11</sup> Dalam domain komunikasi politik, esensi kekuasaan tidak hanya diperlukan dalam konteks politik, ekonomi atau sosial saja, tetapi juga dalam konteks simbolis. Suatu wacana dianggap dominan dan *legitimate* karena ia mempunyai otoritas, *prestise*, dan oleh karena itu diasosiasikan sebagai kebenaran. Politik, media massa dan ilmu pengetahuan dianggap menjalankan kontrol ideologi karena wacana yang muncul di dalamnya terlegitimasi oleh kontrol kriteria kebenaran, seperti informasi, fakta, dan keahlian. Tidak adanya fakta, tafsir dan informasi tandingan dari wacana alternatif, dapat menghasilkan efek *self-legitimizing* bagi wacana dominan. Hal ini terjadi karena kelompok dominan menguasai akses tunggal terhadap sumber-sumber simbolik yang disebut sebagai pengetahuan otoritatif dan pendapat otoritatif.<sup>12</sup>

Praktek delegitimasi akan sangat efektif jika dilakukan dalam suatu keselarasan dengan *common sense*, norma, nilai, dan ideologi yang berlaku secara umum. Kesimpulan ini dapat digunakan untuk memahami perilaku kelompok dominan yang cenderung mengontrol institusi yang mempunyai akses khusus terhadap ilmu pengetahuan, kebenaran dan opini, seperti universitas, laboratorium, birokrasi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga ini mempunyai otoritas yang sangat khas dan kuat, bahkan didefinisikan sebagai "klaim kebenaran".<sup>13</sup> Klaim kebenaran ini bukan hanya karena mereka mempunyai akses preferensial terhadap wacana publik dan kontrol media, tetapi terlebih-lebih karena mereka mempunyai output yang bersifat *incontrovertible, reliable dan scientific*. Output yang demikian ini mempunyai asosiasi yang kuat terhadap kebenaran, sehingga pada taraf tertentu dapat disejajarkan

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

dengan norma, nilai atau ideologi. Kelompok dominan sering memanipulasi otoritas atau status lembaga-lembaga ini untuk melegitimasi wacana dan klaim-klaim politik mereka.

### De-Soekarnoisasi Dalam Wacana Politik Orde Baru

Bagaimanakah sebenarnya sikap rejim Orde Baru terhadap Bung Karno? Hal ini tergambar dari falsafah yang dipegang Soeharto sebagai representasi terkuat rejim Orde Baru dalam menghadapi Bung Karno. Dalam berbagai kesempatan, Soeharto selalu menegaskan bahwa sikapnya terhadap Bung Karno didasarkan pada falsafah *mikul dhuwur mendhem jero*, sebuah falsafah dalam budaya Jawa yang mengajarkan bahwa "anak harus melestarikan kebaikan dan kehormatan orangtua, serta bersedia mengubur dalam-dalam kesalahan-kesalahannya."<sup>14</sup> Negara diasosiasikan sebagai sebuah keluarga, Bung Karno dan para pejuang pendahulu bangsa lainnya sebagai orangtua, dan generasi yang lahir sesudahnya sebagai anak. Generasi yang lebih muda berkewajiban untuk menghormati para pendahulunya dengan mewarisi kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan dan melupakan semua keburukannya. Dengan demikian, segenap elemen Orde Baru juga harus dapat menghormati dan menjaga nama Bung Karno sebagai pendahulu bangsa.

Persoalannya kemudian sejauh manakah konsistensi rejim Orde Baru terhadap falsafah itu. Rejim Orde Baru menunjukkan komitmen untuk menghormati Bung Karno dengan membangun Tugu Proklamator sekaligus mengakuinya sebagai Proklamator Kemerdekaan RI, menggunakan namanya — bersama nama Bung Hatta — sebagai nama bandara udara terbesar di Indonesia, menugaskan makamnya, dan lain-lain.<sup>15</sup> Sebagai penguasa Orde Baru, Soeharto tidak memenuhi tekanan banyak pihak di sekitar tahun 1966 — mahasiswa, militer, dan kelompok-kelompok anti-Soekarno — untuk mengadili Bung Karno berkaitan dengan kemungkinan keterlibatannya dalam peristiwa G 30 S PKI. Sikap ini konon merupakan wujud kesungguhan Soeharto untuk *mikul dhuwur mendhem jero* terhadap Bung Karno.

<sup>14</sup> Soeharto, *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya* (Biografi), seperti yang dituturkan pada G Dwipayana dan Ramadhan K. H., Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, hlm. 166

<sup>15</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan yang diberikan Soeharto dalam *Ibid.*, hal. 246-247.

Namun di sisi lain, ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa rejim Orde Baru cenderung inkonsisten dan ambigu dalam *mikul dhuwur mendhem jero* terhadap Bung Karno. Kecenderungan ini terutama sekali tergambar dalam persepsi unsur-unsur rejim Orde Baru tentang peranan Bung Karno dalam G 30 S/PKI. Fenomena penerbitan buku putih berjudul *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* oleh Sekretariat Negara sangat jelas menunjukkan ambiguitas itu. Meskipun tidak satu kata pun dalam buku tersebut yang menyatakan keterlibatan Bung Karno dalam G 30 S/PKI, sulit untuk dipungkiri bahwa uraian-uraian tentang sikap dan perilaku Bung Karno di dalamnya cenderung menggiring masyarakat untuk menyimpulkan bahwa Bung Karno "terlibat". Apapun alasannya — meluruskan sejarah, memberi pendidikan politik atau yang lainnya — perlu dipertanyakan apakah hal itu sesuai dengan komitmen Orde Baru untuk *mikul dhuwur mendhem jero* terhadap Bung Karno.

Rachmawati Soekarnoputri pernah menyimpulkan adanya dualisme sikap Pemerintah Orde Baru terhadap Bung Karno. Di satu sisi, Pemerintah mengakui Bung Karno sebagai pahlawan dan proklamator kemerdekaan, di sisi lain, Pemerintah mengizinkan terbitnya buku-buku yang mendiskreditkan dan merusak nama baik Bung Karno, membiarkan pihak-pihak yang menebarkan persepsi bahwa ia komunis, serta melarang berdirinya Universitas Bung Karno.<sup>16</sup> Pararel dengan pendapat Rachma, Harian *Merdeka* pernah berpendapat bahwa negara Orde Baru menggunakan standart ganda dalam bersikap terhadap Bung Karno.

Dualisme ini juga tersirat dari pendapat Karen Brooks yang mendefinisikan politik rejim Orde Baru terhadap Bung Karno sebagai politik *containment and cooptation*. Menanggapi implementasi falsafah *mikul dhuwur mendhem jero*, Brooks menyatakan:

<sup>16</sup> Berita Utama: "Suara Anak, Istri, Cucu", *Editor*, 24 September 1988, hal. 15.

".....Soeharto menerapkan dua pendekatan yang berbeda terhadap Bung Karno. Ia secara diam-diam berusaha mendiskreditkan Bung Karno dan mengontrol pengaruhnya yang masih sangat kuat. Ketika taktik ini kurang berhasil, Soeharto berusaha untuk mewarisi popularitas Bung Karno dengan menempatkan diri sebagai bagian dari kontinum yang telah digerakkan oleh kepemimpinan Bung Karno. Kombinasi antara penafian dan penghargaan ini menjadi ekspresi dasar dari falsafah *mikul dhuwur mendhem jero* yang dipegang Soeharto, ia dapat menunjukkan penghormatannya kepada Bung Karno sekaligus membelenggu mitologi-mitologi tentang Bung Karno dengan selalu menekankan bahwa Bung Karno telah melakukan berbagai kesalahan."<sup>17</sup>

Suatu hal yang sulit disangkal bahwa selama era Orde Baru, rejim Soeharto telah melakukan berbagai usaha untuk menetralsisir, menegasikan dan menghapus peran sejarah, pengaruh, mitos dan simbol-simbol tentang Bung Karno. Usaha inilah yang kemudian diistilahkan sebagai *De-Soekarnoisasi*. De-Soekarnoisasi tidak hanya dilakukan dengan praktek-praktek yang manifes, misalnya dengan memangkas pengaruh Bung Karno dalam tubuh birokrasi dan menyingkirkan perwira-perwira Soekarno dari tubuh militer<sup>18</sup>, tetapi juga pada ranah simbolik-laten, yakni dengan menegasikan ajaran-ajaran Bung Karno, mengingkari kontribusi-kontribusi ideologisnya, serta dengan menciptakan gambaran yang *illegitimate* dan *unfavourable* dalam setiap wacana tentang Bung Karno.

<sup>17</sup> "...Soeharto has taken different approaches toward Sukarno. He has quietly encouraged efforts to discredit Sukarno and worked to control the strength of his legacy. When this tactic has proven unfruitful, Soeharto has tried to co-opt his predecessor's popularity by presenting himself as part of the continuum that Sukarno's leadership set into motion. This alternation between containment and cooptation has found its ultimate expression in Soeharto's *mikul dhuwur mendhem jero* philosophy; he can appear chivalrous in his calls to honor Sukarno while limiting the former president's mythological stature by implying that he had made mistakes," Karen Brooks, "The Rustle of Ghosts: Bung Karno in The Indonesia New Order," *Indonesia*, 060, 1994, hal. 97.

<sup>18</sup> Tentang penyingkiran perwira-perwira yang loyal terhadap Bung Karno dari tubuh militer Indonesia, lihat Akhmad Zaitu Ahar, *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, LKIS, 1995, hal. 134, serta Mohtar Mas'ud, *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, LP3ES, 1989, hal. 154.

### a. Periode Yang Penuh Pembatasan: *Enforced Silence (1970-1978)*<sup>19</sup>

Bung Karno meninggal dunia pada 21 Juni 1970. Sungguh tragis nasib Proklamator Kemerdekaan Indonesia ini di penghujung hidupnya. Ia digulingkan dari kursi kepresidenan, dicaci-maki, "dirumahkan", dan meninggal dunia dalam kondisi menderita secara fisik dan mental. Dengan kondisi kematian Bung Karno yang demikian itu, menarik untuk mengkaji bagaimana sikap Soeharto terhadap kematian Bung Karno. Tentang hal ini, Brooks berpendapat:

"Soeharto sangat hati-hati dalam menghadapi Soekarno setelah G 30 S 1965. Di satu sisi, ia membiarkan Bung Karno berusaha mempertahankan pengaruh politiknya, sedangkan di sisi lain, secara diam-diam dan perlahan-lahan menghantarkan rejim Bung Karno ke arah kehancuran. Soeharto menunjukkan sikap yang halus sekaligus licik dalam menangani isu-isu kematian Bung Karno."<sup>20</sup>

Seperti yang diwasiatkan oleh Bung Karno sendiri, keluarga Bung Karno memutuskan untuk memakamkan Bung Karno di Batu Tulis, Bogor. Namun sebagai penguasa Orde Baru, Soeharto berkehendak lain. Bogor dianggap terlalu dekat dengan Jakarta sehingga pemakaman Bung Karno di Bogor secara politis tidak menguntungkan rejim Orde Baru. Soeharto juga menolak usul pemakaman Bung Karno di taman makam pahlawan Jakarta, dan justru memilih Blitar sebagai tempat pemakaman *Putera Sang Fajar*. Blitar, tempat asal orangtua Bung Karno dianggap tempat yang paling "aman" untuk memakamkan Bung Karno. Keputusan Soeharto itu dapat dilihat sebagai sikap yang *unfavourable* terhadap Bung Karno. Namun Soeharto juga menunjukkan sikap yang *favourable* dengan mengumumkan hari berkabung nasional untuk

<sup>19</sup> Dalam penelitian yang telah dilakukannya, Brooks menemukan perbedaan sikap dan perlakuan rejim Orde Baru terhadap Bung Karno antara periode 1970-1978 dan periode 1978-1980. Periode pertama diistilahkan Brooks sebagai periode *enforced silence* dan diwarnai dengan sikap politik rejim Orde Baru terhadap Bung Karno yang cenderung dingin dan negavistik. Sedangkan periode kedua diistilahkan sebagai periode *reticent rehabilitation* yang diwarnai dengan perlakuan atau sikap politik negara Orde Baru terhadap Bung Karno yang telah berubah menjadi lebih positifistik dan *favourable*. Brook, *op. cit.*, hal. 64-69.

<sup>20</sup> "Soeharto had chosen to act very cautiously in regards to Sukarno after the coup, allowing the president to retain many of the outward trappings of power while working quietly and patiently to bring his regime to an end. President Soeharto showed similar delicacy and shrewdness in dealing with the issues as Sukarno's death." *Ibid.*, hal. 65.

menghormati kepergian Bung Karno dan menyelenggarakan upacara pemakaman secara militer.

Keputusan yang diambil Soeharto berkaitan dengan momentum kepergian Bung Karno itu memperkuat sikap dasarnya terhadap Bung Karno. Keputusan ini menunjukkan beberapa hal yang sangat signifikan: tendensi untuk menciptakan saluran kanalisasi kekecewaan-kekecewaan yang timbul akibat kejatuhan Bung Karno, tendensi untuk menghindari munculnya tuduhan bahwa Soeharto tidak menghormati dan tidak berterima kasih terhadap Bung Karno sebagai seniornya, tendensi untuk menempatkan diri sebagai bagian dari sebuah kontinum kekuasaan yang telah sejak awal dipolakan oleh Bung Karno.<sup>21</sup> Menyadari bahwa luka akibat pertumpahan darah akhir dekade 60-an sangat mendalam, Soeharto memberikan prioritas lebih terhadap situasi eksplosif yang tercipta dan sangat hati-hati dalam mengeluarkan konsensus baru. Pada saat yang sama, Soeharto secara perlahan-lahan berusaha mengeliminir dampak-dampak dari setiap keputusan politik yang diambilnya. Hal ini dapat terlihat dari sikap rejim Orde Baru terhadap momentum kematian Bung Karno. Teks pidato pemerintah dibuat sedapat mungkin seimbang terhadap kebaikan dan keburukan Bung Karno, upacara pemakaman dilaksanakan sesingkat mungkin, dan tempat pemakaman dipilih dengan pertimbangan utama agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Dengan kata lain, Soeharto berusaha untuk sekaligus menghormati dan mengontrol pengaruh Bung Karno. Taktik ini dipertahankan Soeharto selama dua puluh tahun memimpin Orde Baru.<sup>22</sup>

Brooks mencatat bahwa setelah "periode" wafatnya Bung Karno itu, negara Orde Baru melakukan gerakan netralisasi terhadap hal-hal yang mencerminkan pengaruh Bung Karno. Selama awal dekade 1970-an, diskusi tentang Bung Karno sangat dibatasi. Sebuah larangan tak resmi diberlakukan terhadap publikasi tulisan-tulisan politik Bung Karno. Nama presiden pertama Indonesia ini jarang, atau bahkan tidak pernah sama sekali, disebut-sebut oleh unsur-unsur rejim Orde Baru. Meskipun keyakinan bahwa Pancasila adalah falsafah yang dirumuskan oleh Bung Karno telah mengakar kuat dalam skema interpretasi mayoritas bangsa Indonesia, referensi yang mengkaitkan Bung

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 66.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Karno dengan Pancasila hampir sepenuhnya diingkari oleh negara Orde Baru.

Selain itu, negara Orde Baru juga membiarkan C.A. Dake, ilmuwan politik dari Freie Universitaat Bonn, mempublikasikan buku kontroversial berjudul *Indonesia the Spirit of Red Banteng* yang menyimpulkan bahwa aktor utama di balik G 30 S/PKI 1965 adalah Bung Karno dan bukannya PKI. Setahun kemudian Dake juga mempublikasikan buku *The Devious Dalang: Sukarno and the So-Called Untung Pustch; Eyewitness Report by Bambang S. Widjanarko* yang memperkuat kesimpulan dalam buku pertama tadi. Dari judulnya saja telah dapat diduga bahwa dua buku ini provokatif dan delegitimatif terhadap Bung Karno. Perlu digarisbawahi bahwa peredaran dua buku ini baru dinyatakan terlarang tahun 1990, setelah sempat berlangsung selama 17 tahun.

#### *b. Periode Rehabilitasi Diam-Diam: Reticent Rehabilitation (1978-1980)*

Dalam sebuah acara ulang tahun PDI tahun 1978, Ali Moertopo mengumumkan rencana Presiden Soeharto untuk memugar kompleks makam Bung Karno di Blitar. Dalam pandangan Brook, momentum ini menandai berakhirnya periode *enforced silence* dan dimulainya era kemunculan kembali kisah atau kenangan tentang Bung Karno dalam wacana publik dan dalam realitas psiko-historis masyarakat Indonesia.

Jika bertolak dari perlakuan rejim Orde Baru terhadap Bung Karno pada masa sebelumnya, rencana pemugaran makam Bung Karno itu tentu sesuatu hal yang kontroversial dan mengundang kecurigaan. Ada beberapa prediksi Brooks tentang hal ini.<sup>23</sup> *Pertama*, pemugaran makam Bung Karno itu benar-benar merupakan wujud penghormatan pribadi Soeharto kepada Bung Karno. *Kedua*, rencana itu merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi pemilu 1992. Rencana pemugaran ini bagaimana pun merupakan refleksi sikap yang *favourable* terhadap Bung Karno. Brooks memperkirakan di balik sikap ini, ada tendensi politis untuk menetralisasi kekecewaan kalangan "loyalis Bung Karno" atas sikap negara Orde Baru terhadap Bung Karno sebelumnya. Kekecewaan ini dapat menimbulkan sikap a priori, bahkan antipati terhadap

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 66-67.

partai pemerintah (Golkar), dan sebaliknya menimbulkan dorongan untuk memilih partai politik yang "berseberangan" dengan pemerintah. Dengan kata lain, kekecewaan itu dapat menjadi kendala Golkar untuk memenangkan pemilu. *Ketiga*, rencana yang dapat menimbulkan efek rehabilitasi nama Bung Karno bertujuan itu untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari aksi-aksi protes mahasiswa yang cenderung semakin semarak tahun 1977-1978.

Rencana pemugaran makam Bung Karno ini menimbulkan dampak cukup besar terhadap wacana politik nasional. Membicarakan Bung Karno tidak ditabukan lagi, dan simbol-simbol Bung Karno dibiarkan muncul dalam berbagai bentuk. Sungguh mencengangkan bahwa tidak kurang dari tiga puluh buku tentang Bung Karno diterbitkan dalam jangka waktu kurang dari setahun. Media massa sibuk dengan laporan dan tulisan tentang Bung Karno. Gambar-gambar Bung Karno dicetak dalam berbagai medium: poster, sticker, T-Shirt, topi, dan lain-lain; yang dijual bebas di sudut-sudut jalan, trotoar, supermarket dan lain-lain. Diskusi-diskusi tentang Bung Karno juga tidak mendapatkan hambatan yang berarti, sehingga gambaran Bung Karno benar-benar medominasi wacana publik.

Istilah *reticent rehabilitation* memang tepat untuk menggambarkan periode ini. Citra Bung Karno semakin membaik akibat sikap negara Orde Baru yang semakin positif terhadap Bung Karno. Sikap ini sangat kondusif bagi lahirnya wacana-wacana tentang Bung Karno yang melibatkan banyak kalangan. Sentimen Sukarnoisme merebak lagi di semua lapisan sosial, dan terjadi eskalasi idealisasi terhadap Bung Karno di kalangan generasi muda. Perkembangan-perkembangan ini pada gilirannya memicu kekhawatiran sekaligus kewaspadaan di kalangan rejim Orde Baru.<sup>24</sup>

### c. Menegasikan Bung Karno Dalam Kontroversi Politik

Periode *reticent rehabilitation* mulai berakhir awal dekade 80-an dengan munculnya beberapa kontroversi tentang Bung Karno. Adalah Rosihan Anwar, seorang wartawan senior dan "lawan politik" Bung Karno di era Orde Lama, yang memulai kontroversi dengan melansir tulisannya di harian *Kompas* September 1980. Dengan membandingkan gaya kepemimpinan Bung Karno

dengan Bung Hatta, Rosihan Anwar melontarkan gugatan terhadap konsistensi Bung Karno sebagai pemimpin bangsa. Dengan mengutip buku John Ingleson tentang sejarah gerakan nasionalis Indonesia, ia menyatakan bahwa ketika berada di Penjara Sukamiskin tahun 1933, Bung Karno pernah mengirimkan empat surat permohonan ampunan (pembebasan) kepada Pemerintah Belanda. Dalam surat itu, seperti yang diuraikan Rosihan Anwar, Bung Karno berjanji untuk tidak aktif lagi dalam kegiatan politik jika Pemerintah Belanda bersedia membebaskannya.

Sebuah tulisan yang menghebohkan tentunya. Tak pelak, debat publik pun tak terhindarkan. Kalangan dekat Bung Karno, intelektual, sejarawan, mahasiswa, dan kalangan politik turut berbicara, membenarkan interpretasi dan argumentasi masing-masing. Namun, harus diakui bahwa mayoritas masyarakat pesimistik terhadap tuduhan Rosihan Anwar. Mereka umumnya mempersoalkan sisi etis tuduhan itu, relevansinya bagi sejarah dan masa depan bangsa, keotentikan dokumen-dokumen yang digunakan, bahkan ada yang mencurigai adanya kepentingan politik tertentu di balik munculnya tuduhan itu.

Setahun setelah kontroversi "Sukamiskin", khalayak nasional dihebohkan lagi oleh artikel berjudul "Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara" yang ditulis Nugroho Notosusanto, Kepala Pusat Sejarah Militer ABRI, di majalah *Sinar Harapan* 3 Agustus 1981. Dalam artikel ini, Nugroho menyatakan bahwa Bung Karno bukan orang pertama yang merumuskan lima prinsip Pancasila, dasar negara Indonesia. Bung Karno hanyalah orang yang memunculkan istilah Pancasila. Berdasarkan buku susunan Mohammad Yamin, Nugroho menyimpulkan bahwa perumus utama Pancasila adalah Muhammad Yamin, Supomo, baru kemudian Bung Karno. Bertolak dari premis ini, Nugroho juga menggugat keabsahan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila.<sup>25</sup>

Menarik untuk dicatat, bahwa premis yang merupakan re-evaluasi terhadap sejarah Pancasila ini paralel dengan perubahan kebijakan yang ditunjukkan rejim Orde Baru. Seperti diuraikan oleh Brooks, Soeharto menghapus peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni, dan melarang semua bentuk peringatan pada tanggal itu. Ketika artikel Nugroho itu dilansir, MPR bahkan telah tiga kali (1966, 1973, dan 1978) memutuskan bahwa rumusan Pancasila

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 72.

yang legal dan otentik yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 tidak meliputi pemikiran Bung Karno tentang internasionalisme dan rumusan pemikirannya yang lain.<sup>26</sup> Pada saat selanjutnya, secara transparan rejim Orde Baru mengabsahkan premis Nugroho di atas. Tahun 1980, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan artikel Nugroho itu menjadi sebuah *booklet* 69 halaman yang dijadikan bacaan wajib bagi para guru pengajar pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila).<sup>27</sup>

Dalam kaca mata Brooks, tindakan Nugroho di atas mendapat "restu" Pemerintah, sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan "keseimbangan" perspektif tentang Bung Karno. Dengan kata lain, peningkatan idealisasi terhadap Bung Karno di kalangan loyalis Bung Karno dan generasi muda, diimbangi dengan usaha-usaha untuk menegaskan makna penting sang proklamator ini dalam konteks sejarah Bangsa Indonesia. Kebangkitan kekuatan nostalgik terhadap Bung Karno dan semakin kuatnya mitos-mitos tentang Bung Karno dalam realitas psikologis masyarakat sekitar tahun 1978 cukup mengkhawatirkan rejim Orde Baru, sehingga Nugroho diinstruksikan untuk melakukan *counter* dengan cara menciptakan gambaran-gambaran yang *illegitimate* tentang Bung Karno.<sup>28</sup>

Brooks semakin yakin dengan kesimpulan tersebut tatkala melihat realitas bahwa di tahun 1968, Nugroho bersama dengan Ismail Saleh juga melakukan praktek delegitimasi terhadap Bung Karno. Mereka meluncurkan buku *The Coup Attempt of the September 30 Movement in Indonesia* yang secara garis besar berisi kesimpulan rejim Orde Baru bahwa PKI adalah kekuatan di balik peristiwa G 30 S/1965 yang telah diberi kesempatan oleh Bung Karno untuk berkembang pesat pada akhir dekade 50-an dan awal dekade 60-an.<sup>29</sup> Tahun

<sup>26</sup> *Ibid.* Dengan mengutip Oey Hong Lee, Brooks memberi tanggapan tentang hal ini, "The Pancasila so crucial to New Order rule is not the same as that elicited by Sukarno in 1945."

<sup>27</sup> Dua minggu setelah pemuatan artikel Nugroho itu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1980, Institut Sukarno-Hatta mengumumkan "Deklarasi Pancasila" yang berisi pernyataan penegasan bahwa tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Deklarasi ini ditandatangani 17 tokoh masyarakat, diantaranya adalah Jusuf Hasyim (pemimpin PPP), Usep Ranawijaya (pemimpin senior PDI), H.R. Dharsono (mantan Sekretaris Jenderal ASEAN) dan Jenderal (purn) Hugeng (purnawirawan Polisi). Deklarasi ini dibacakan di Monumen Sukarno-Hatta, Jalan Proklamasi Jakarta. *Ibid.*, hal. 73

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 74

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 73. Buku ini merupakan reaksi atas analisis yang dibuat Bens Anderson Ruth McVey *Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* yang menyimpulkan bahwa ABRI lah yang menjadi pemain utama dalam peristiwa G 30 S/1965.

1978, Nugroho memimpin tim yang bertugas menyusun *Buku Putih G 30 S Tahun 1965*. Buku yang tidak sempat dipublikasikan ini, berisi kesimpulan yang kurang lebih serupa dengan kesimpulan buku di atas. Meskipun kedua buku ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Bung Karno terlibat dalam G 30 S/1965, uraian bahwa PKI berkembang di bawah lindungan Bung Karno yang ada di dalamnya mensiratkan tendensi untuk menyimpulkan bahwa peristiwa ini mustahil terjadi tanpa "restu" Bung Karno.

Tapi benarkah Pemerintah berada di balik usaha-usaha Nugroho itu? Brooks menganalisis hal ini dengan bertolak pada perkembangan karir Nugroho setelah berhasil melakukan usaha-usaha itu. Meskipun premis-premisnya yang menyudutkan Bung Karno dikecam oleh banyak pihak, Nugroho tetap dipromosikan Pemerintah menjadi Rektor Universitas Indonesia pada tahun 1982. Setahun kemudian, Nugroho bahkan diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kedudukannya yang terakhir ini, Nugroho terus melakukan praktek-praktek delegitimasi terhadap Bung Karno, yang salah-satunya berupa pengingkaran peran sejarah Bung Karno dalam buku-buku teks sejarah nasional yang diajarkan di pendidikan tingkat SD hingga SLTA.

Tendensi delegitimasi rejim Orde Baru terhadap Bung Karno juga tercermin dalam pernyataan-pernyataan para aparatnya yang terlibat dalam perdebatan tentang Bung Karno di media massa. Berikut ini dibahas beberapa kutipan pernyataan aparat rejim Orde Baru yang bernada provokatif dan konfrontatif terhadap Bung Karno dalam kaitannya dengan isu-isu politik/ideologis yang muncul dalam wacana media.

Dalam suatu kesempatan wawancara dengan *Forum Keadilan*, ketua tim penyusun buku putih tentang G 30 S tahun 1965, Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, mengeluarkan statemen yang sangat provokatif terhadap Bung Karno, seperti berikut:

"Ya, menurut saya, dia (Bung Karno, pen) *seneng* sama PKI. Wong dia tidak mau membubarkan PKI.....Apakah dia memproklamasikan kemerdekaan? Iya. Apakah dia membikin konsepsi Nasakom? Iya. Apakah waktu PKI berontak Bung Karno tidak membubarkan PKI? Iya. Itu saja penilaian saya. Apa Bung Karno dicabut kekuasaannya oleh MPRS? Iya. Nah, logikanya, masak orang yang tidak bersalah tiba-tiba kekuasaannya dicabut oleh MPRS? Kan tidak mungkin."<sup>30</sup>

<sup>30</sup> "Saya Tidak Berani Menghukum Bung Karno", *Forum Keadilan*, 27 Oktober 1994, hlm. 21

Perlu digarisbawahi bahwa masyarakat dapat menerjemahkan pernyataan Moerdiono ini sebagai refleksi sikap Pemerintah terhadap Sang Proklamator, karena Moerdiono tidak secara tegas menempatkan diri sebagai pribadi ketika mengemukakannya.

Bukan sekali ini saja Moerdiono mengeluarkan pernyataan provokatif terhadap Bung Karno. Menanggapi munculnya "Barisan Soekarno" di panggung politik Orde Baru yang tampaknya notabene akan bergabung dengan PDI, Moerdiono menyatakan:

"Mesti diingat, Soekarno selalu membasmi — dengan cara menahan — lawan-lawan politiknya. Bahkan, R.A.J. Soedjatin dan HAMKA pun di tahan .... ia menyebut dirinya. Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi atau Panglima Tertinggi ABRI. Itu kan gambaran dari absolutisme kekuasaan .... Soekarno selalu memakai pakaian militer dengan tanda pangkat yang dikarang sendiri. Padahal dia bukan militer. Sedang Pak Harto yang memang militer lebih suka pakai baju sipil saja .... mesti ingat, ajaran Bung Karno juga menysangatkan rakyat negeri ini. Ini fakta sejarah."<sup>31</sup>

Realitas lain yang tak kalah menarik adalah sikap rejim Orde Baru ketika Kol. (Purn) Soegiarso Soerojo mempublikasikan buku *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai* tahun 1988. Buku ini sarat dengan klaim dan tuduhan bahwa Bung Karno seorang Marxis, komunis, serta terlibat dalam G 30 S/1965. Cukup mengherankan bahwa di antara para aparat negara sendiri tidak ada sinkronisasi persepsi tentang suatu hal sangat substansial, sehingga penilaian-penilaian yang mereka lontarkan justru cenderung memperkeruh polemik yang terjadi.

Di satu sisi, Moerdiono dengan tegas menyatakan, "Secara politik Bung Karno pasti disalahkan. Buktinya ada Tap MPRS tahun 1967, yang mencabut kekuasaannya dan tidak diterima pelaksanaan *Nawaksara*-nya."<sup>32</sup> Dengan mengutip hasil Sidang MPRS (1967), Ketua BP-7, Oetoyo Oesman, juga menyatakan:

"Itulah kesalahan (Bung Karno, pen) yang bertautan dengan Peristiwa G 30 S/PKI. Yakni, kesalahan di bidang politik dan kesalahan yuridis. Dua kesalahan itu yang menyebabkan Bung Karno dikoreksi oleh wakil rakyat yang duduk dalam lembaga tertinggi negara MPRS di tahun 1967. Saya sebagai orang BP-7 harus objektif ... Apa yang saya kemukakan ini saya ambil dari fakta-fakta yang terjadi dalam Sidang Istimewa MPRS tahun 1967."<sup>33</sup>

Menurut Jaksa Agung, ketika itu dijabat oleh Sukarton Marmosudjono, substansi buku karya Soegiarso itu tidak mengganggu ketertiban umum sehingga tidak perlu dilarang. Tentang tuduhan Soegiarso terhadap Bung Karno, Sukarton berpendapat, "Sebagai proklamator (Bung Karno, pen) dihargai. Tetapi sebagai insan politik, tentu kita harus objektif. Jangan ditutup-tutupi jeleknya. .... Kita harus objektif. Fakta-fakta sejarah tidak bisa ditutup-tutupi ...."<sup>34</sup>

Namun tidak semua unsur rejim Orde Baru mempunyai kecenderungan yang demikian terhadap Bung Karno. Dengan pendekatan yang berbeda, Menteri Dalam Negeri Rudini mengungkapkan komitmennya untuk *mikul dhuwur mendhem jero* terhadap Bung Karno sebagaimana terhadap pendahulu bangsa yang lain. Menggaris-bawahi perlunya semua pihak berpegang pada falsafah jawa ini dalam menghadapi Bung Karno, Rudini menyatakan, "Setiap orangtua ada saja kekurangannya. Tapi, apa ada anak memaki-maki Bapak? .... Apalagi orangtua itu telah meninggal dunia."<sup>35</sup> Senada dengan Rudini, Kassospol ABRI Letjen Harsudino Hartas mengingatkan:

"Adalah durhaka mengungkit-ungkit persoalan orangtua yang sudah meninggal dunia" .... alangkah tidak baiknya, orangtua (Bung Karno) *diundhat-undhat* (diungkit-ungkit) kesalahannya — apalagi oleh bangsa yang ber-Pancasila ...."<sup>36</sup>

<sup>31</sup> "Nostalgia PNI Gadungan", *Editor*, 28 September 1991, hal. 23

<sup>32</sup> "Lagi, Soal-Soal Sekitar Bung Karno", *Editor*, 1 Oktober 1988, hal. 8.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Forum Keadilan, op. cit.* hal. 12.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hal 9.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Cukup mengherankan bahwa terhadap masalah yang sangat krusial seperti persoalan kedudukan Bung Karno dalam sejarah bangsa tidak ada kesamaan persepsi dan pandangan antara unsur-unsur pemerintahan. Tuduhan bahwa Bung Karno terlibat dalam G 30 S/1965 ini tentu saja bukan hal yang sepele. Tuduhan ini berkaitan dengan kepastian sejarah, harga diri bangsa, dan persepsi generasi penerus bangsa terhadap pahlawan dan masa lalu bangsanya. Generasi penerus diharuskan belajar pada sejarah, lalu bagaimana jika sejarah itu sendiri masih sarat dengan ketidakpastian dan kesimpangsiuran?

#### d. "De-Soekarnoisasi" Dalam Buku-Buku Pendidikan

Penafian peranan dan kedudukan Bung Karno dalam sejarah bangsa juga terjadi dalam buku-buku teks pendidikan. Untuk melihat hal ini, dapat disimak kajian yang pernah dilakukan Barbara Leigh terhadap buku-buku teks pendidikan tingkat dasar hingga SLTA di Indonesia.<sup>37</sup> Wacana politik Orde Baru tentang Bung Karno ternyata juga dapat dipelajari dari konstruksi kisah-kisah sejarah Bung Karno dalam buku teks pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerangka berpikir dan basis interpretasi tertentu ditonjolkan dalam praktek pendidikan, baik pada dataran teoritis-tekstual maupun dataran teknis-praksis, serta kemungkinan dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Pada saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto pernah diinstruksikan oleh Presiden Soeharto untuk merevisi pelajaran sejarah sekolah dengan menekankan instabilitas politik di era kepemimpinan Bung Karno tahun 50-an. Instruksi ini konon bertujuan agar generasi muda tidak melihat yang benar sebagai salah, dan sebaliknya yang salah sebagai benar.<sup>38</sup> Berawal dari revisi inilah kemudian bermunculan konstruksi-konstruksi yang *unfavourable* tentang Bung Karno dalam buku teks sejarah untuk pendidikan dasar hingga menengah.

<sup>37</sup> Barbara Leigh, "Making The Indonesian State: The Role of School," *RIMA*, Vol. 25, Winter 1991, hal 17-43.

<sup>38</sup> Instruksi ini seperti dijelaskan oleh Menko Kesra Ajamsyah Ratu Prawiranegara dalam *Sydney Morning Herald*, 4 Maret 1987, seperti dikutip dalam *Ibid.*, Hal. 28.

Penggambaran yang *unfavourable* terhadap Bung Karno diidentifikasi Leigh dalam buku teks *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka*.<sup>39</sup> Buku ini terdiri dari empat volume; volume 1 dan 2 menjelaskan sejarah era kepemimpinan Bung Karno. Volume 1 (1945-1949) diawali dengan cover foto Bung Karno membacakan proklamasi Kemerdekaan 1945. Dalam kacamata Leigh, foto yang memperlihatkan Bung Karno sedang menundukkan pandangannya ini cenderung menafikan kharisma Bung Karno. Kebesaran kharisma Bung Karno tidak tergambarkan sebagaimana halnya yang tergambar dalam biografi Bung Karno yang disusun Cindy Adams dan John Legge. Buku ini terdiri dari 254 halaman, dan hampir seluruhnya berisi foto atau gambar. Namun, foto Bung Karno hanya dimunculkan 14 kali dan rata-rata berupa foto yang sulit diamati karena berukuran kecil atau foto dengan sudut pengambilan yang kurang tepat.<sup>40</sup>

Dalam volume 2 (1950-1964), buku teks *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka* menguraikan sejarah bangsa di era Bung Karno memaparkan karir kepresidenannya. Dalam volume ini, terdapat 43 foto Bung Karno dan 7 foto Soeharto. Meskipun banyak memuat foto Bung Karno, volume ini hanya sedikit sekali menjelaskan peranan-peranan politik dan pemerintahan Bung Karno.

Sedangkan volume 3 (1965-1974) menjelaskan sejarah perjalanan bangsa yang diwarnai dengan peralihan kekuasaan dari Bung Karno ke Soeharto. Dalam volume ini, kekacauan ekonomi "warisan" Orde Lama ditonjolkan dan rencana pembangunan rejim Orde Baru diterangkan dalam format bergambar. Leigh mencatat beberapa penyajian yang berdampak buruk terhadap citra Bung Karno dalam konteks sejarah. Di antaranya adalah penyajian foto Bung Karno dengan pemimpin PKI Aidit, karikatur yang

<sup>39</sup> Buku *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka* ini merupakan buku teks sejarah untuk setingkat SMU, dengan subyek "Sejarah Perjuangan Nasional". Terdiri dari empat volume, masing-masing volume berupa sejarah perjuangan bangsa era 1945-1949 (Volume 1), 1950-1964 (Volume 2), 1965-1973 (Volume 3), 1973-1974 (Volume 4), *Ibid.*, hal. 30.

<sup>40</sup> Dalam volume yang sama, terdapat beberapa foto Letkol Soeharto. Di antaranya adalah foto yang menonjolkan wajahnya, serta foto yang menunjukkan dia sedang ditengah-tengah kerumunan prajurit, yang menggambarkan peran pentingnya dalam Serangan 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Foto yang lain berupa foto sepeleuh halaman Soeharto dengan para veteran perang, serta foto Soeharto dengan Sultan Yogyakarta. Gambar-gambar menurut Leigh ini memperteguh citra Soeharto sebagai militer yang bersih dan sosok pemimpin yang terpercaya. *Ibid.*

menggambarkan Bung Karno menjadi bahan tertawaan mahasiswa berkaitan dengan masalah PKI, serta foto tim dokter dari RRC sedang memberikan perawatan medis kepada Bung Karno.<sup>41</sup>

Penafian citra Bung Karno juga diidentifikasi Leigh dalam analisisnya terhadap pilihan jawaban *multiple choice* pada soal-soal ujian materi sejarah untuk tingkat sekolah dasar. Bung Karno ternyata banyak ditempatkan pada pilihan jawaban yang salah dalam pertanyaan-pertanyaan tentang Pancasila, perjuangan melawan penjajah, dan penumpasan pemberontakan pasca kemerdekaan.<sup>42</sup> Menurut Leigh, realitas ini dapat berdampak buruk terhadap persepsi atau preferensi siswa terhadap sejarah Bung Karno.

Di sisi lain, Leigh juga melihat bahwa dikotomi Orde Lama vs Orde Baru sering dimunculkan dengan pretensi untuk menegaskan bahwa peralihan kekuasaan dari Bung Karno ke Soeharto adalah dalam *term* pergantian kepemimpinan, dan bukannya dalam *term* perebutan kekuasaan (*cup*)<sup>43</sup>. Tema *order vs disorder* juga sering dimunculkan dengan penekanan tertentu, misalnya penekanan bahwa Demokrasi Liberal adalah era yang penuh kekacauan (*disorder*). Kesan yang tertangkap dalam penggunaan tema ini adalah adanya usaha untuk mengidentikkan rejim Orde Lama dengan kondisi-kondisi *disorder*: instabilitas politik, kemerosotan moral, krisis ekonomi, serta sebaliknya mengidentikkan Orde Baru dengan kondisi *order*; Orde Baru digambarkan sebagai tatanan yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari kondisi-kondisi *disorder* warisan Orde Lama serta kemudian menghantarkannya pada tata kehidupan yang lebih baik.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Pemuatan foto Bung Karno bersama Aidit, dan foto ketika mendapatkan perawatan medis dari tim dokter RRC, dapat menimbulkan kesan yang negatif tentang Bung Karno. Sebab semua orang tahu bahwa Aidit adalah salah-satu pemimpin tertinggi PKI, serta bahwa RRC adalah negara komunis yang banyak berperan dalam menopang kelangsungan hidup komunisme di Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa foto Bung Karno dengan tim dokter RRC itu dimunculkan dalam deskripsi peristiwa G 30 S/1965. Lihat *Ibid.*, hal. 31.

<sup>42</sup> *Ibid.* Dalam pilihan-pilihan jawaban yang memuat nama Soeharto, Leigh menemui realitas yang sebaliknya. Tidak satu pun pertanyaan yang menempatkan nama Soeharto dalam pilihan jawaban yang tidak benar.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>44</sup> Tema *order vs disorder* ini banyak diuraikan dalam buku *Sejarah Perjuangan Bangsa* untuk SMP, *Ibid.*, hal. 29.

Jika ditarik dalam tataran yang lebih luas, hal ini memperkuat kesimpulan bahwa rejim Orde Baru berusaha membangun citra yang benar-benar lain dari citra Orde Lama. Orde Baru berusaha menjauhkan diri dari gambaran-gambaran buruk dan traumatik tentang Orde Lama. Orde Baru juga senantiasa menekankan bahwa kekacauan, kekerasan dan instabilitas seperti yang terjadi di era Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan yang mencapai puncak pada tragedi G 30 S/1965 adalah semata-mata "produk" Orde Lama. Usaha-usaha inilah yang akhirnya menimbulkan gambaran bahwa Orde Lama sebagai rejim yang bengis dan jahat, khususnya dalam perbincangan tentang komunisme.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini, Leigh juga menyimpulkan adanya usaha sistematis untuk menghadirkan perspektif yang menempatkan rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sebagai sinonim dari negara Indonesia sebagai suatu kesatuan.<sup>46</sup> Lebih jelasnya, dapat disimak pernyataan Leigh berikut:

*"The message being conveyed is that national unity and the New Order Government of Presiden Soeharto are coextensive. The message of the texts is not just to portray the taken-for-granted unity of the Indonesian State, but also to show that the State is the New Order government of President Soeharto."*<sup>47</sup>

Alasan untuk menghadirkan perspektif ini barangkali adalah bahwa rejim Orde Lama telah identik tatanan *disorder*, sehingga keberadaannya harus dinafikan dalam rangka membentuk citra yang positif bagi rejim yang baru lahir, rejim Orde Baru.

<sup>45</sup> Michael van Langenberg, "Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi, Hegemoni", dalam Yudi Latif dan Idi Subandiy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan*. Mizan, 1996, hal. 230. Tentang kekerasan yang terjadi di era Orde Lama maupun Orde Baru, Langenberg melihat bahwa Orde Baru sebenarnya juga tak kalah "kejam". Langenberg mempersoalkan sikap Rejim Orde Baru yang cenderung kompromistis terhadap aksi pembunuhan massal terhadap sisa-sisa PKI — atau yang diduga sebagai sisa-sisa PKI — yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah sangat besar pasca G 30 S PKI. Langenberg diantaranya menyatakan:

*"Pembunuhan massal dalam skala raksasa pada 1965/1966 justru dimanfaatkan untuk menanamkan ke dalam benak publik sebuah citra bahwa masa Orde Lama adalah periode khaos dan penuh kekacauan. Jelaslah ini berarti Orde Baru mengganggahi kemegahan sejarah penuh pembunuhan itu sebagai alat untuk memapankan legitimasinya. Pembunuhan-pembunuhan itu sendiri tak dipertimbangkan dalam sejarah resmi versi Orde Baru. Pembunuhan skan hal ini memang tak semata-mata sebagai "tindakan halasan" Orde Baru terhadap Orde Lama. Ketika "tindakan balasan" ini didengungkan, maknanya diarahkan sebagai aksi spontan rakyat terhadap gerakan komunis."*

<sup>46</sup> Leigh, *op cit.*, hal. 17.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 31.

## Kesimpulan

Negara Orde Baru berusaha menegakkan legitimasi kekuasaannya dengan berbagai cara. Salah-satunya dengan menciptakan wacana-wacana resmi yang bersifat legitimatif terhadap negara dan sebaliknya bersifat delegitimatif terhadap musuh-musuh negara. Wacana resmi ini merupakan representasi dari pengetahuan resmi negara yang lebih sering difungsikan sebagai sarana produksi dan reproduksi kebenaran versi negara. Dengan kata lain, penyelenggaraan kekuasaan secara kontinyu oleh negara Orde Baru melahirkan pengetahuan-pengetahuan resmi yang notabene berisikan membenaran-pembenaran terhadap sikap, kebijakan dan perlakuan negara terhadap kelompok-kelompok di luar dirinya. Melalui pengetahuan resmi inilah kebenaran versi negara tentang berbagai persoalan disampaikan kepada masyarakat dengan spirit penegasian terhadap wacana, interpretasi dan fakta-fakta alternatif yang dimunculkan kelompok lain.

Hal inilah yang kiranya terjadi terhadap gambaran-gambaran tentang Bung Karno dalam wacana sejarah selama era Orde Baru. Sejak awal kekuasaannya, Soeharto telah menempatkan pengaruh dan simbol-simbol Bung Karno yang masih menancap kuat dalam realitas psiko-historis bangsa sebagai ancaman nyata terhadap legitimasi kekuasaannya. Maka dilakukanlah berbagai upaya untuk mengeliminir pengaruh dan ajaran-ajaran Bung Karno dalam kehidupan birokrasi, militer dan masyarakat pada umumnya, serta untuk mengaburkan peranan dan kontribusi Bung Karno dalam sejarah. Usaha-usaha inilah yang kemudian dikenal dengan De-Soekarnoisasi. Ketika mekanisme legal-formal, perangkat-perangkat koersif dan represi-represi fisik atau psikologis tidak efektif lagi untuk menyudutkan posisi Bung Karno, maka dilakukan De-Soekarnoisasi dalam level wacana. Dilakukanlah praktek-praktek delegitimasi simbolik dengan menampilkan konstruksi-konstruksi yang *illegitimate* dan *unfavourable* tentang Bung Karno dalam setiap *discourse* yang terbentuk tentang Bung Karno.

Dengan otoritas yang dimilikinya, negara bahkan melakukan pengaburan atau rekayasa terhadap fakta-fakta sejarah tentang Bung Karno. Bisa jadi kebenaran-kebenaran historis tentang jejak dan kontribusi positif Bung Karno dalam sejarah bangsa telah ternegasikan ketika wacana resmi tentang Bung Karno terbaca oleh masyarakat. Pada gilirannya, gambaran-gambaran yang *illegitimate* dan *unfavourable* tentang Bung Karno menjadi dominan dalam produk-produk pengetahuan resmi negara: buku-buku pendidikan, "buku putih" G 30 S/1965, jurnal, media cetak dan film yang produksi instansi negara.

Gambaran ini juga tercermin dari pernyataan para aparat negara dalam berbagai perdebatan tentang Bung Karno di media massa. Terlepas dari masalah efektivitas, nuansa De-Soekarnoisasi juga menjadi substansi indoktrinasi terhadap generasi muda ketika buku teks pendidikan yang berisi bahasan tentang Bung Karno digunakan dalam praktek pendidikan tingkat dasar hingga menengah.

## Daftar Pustaka

- Abar, Akhmad Zaini. *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, Yogyakarta: LKIS, 1995.
- Aditjondro, George J. "Pengetahuan-Pengetahuan Lokal Yang Tertindas: Meneropong Gerakan Lingkungan di Indonesia Melalui Konsep "Kuasa/Pengetahuan" Foucault," *Kalam*, edisi 1, 1994, hal. 59-60.
- Brooks, Karen. "The Rustle of Ghosts: Bung Karno in The Indonesia New Order," *Indonesia*, Vol. 60, 1994, hal. 60-99.
- van Dijk, Teun A. *Ideology: A Multidisciplinary Study*, London: Sage, 1998, in Press.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, diedit oleh Colin Gordon, New York: Pantheon Books, 1980.
- van Langenberg, Michael. "Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi, Hegemoni", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan*, Jakarta: Mizan, 1996, hal. 230.
- Leigh, Barbara. "Making The Indonesian State: The Role of School," *RIMA*, Vol. 25, Winter 1991, hal 17-43.
- Mas'ood, Mohtar. *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soeharto, *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya* (Biografi), seperti yang dituturkan pada G. Dwipayana dan Ramadhan K. H., Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
- Editor*, 24 September 1988.
- Editor*, 1 Oktober 1988.
- Editor*, 28 September 1991.
- Forum Keadilan*, 27 Oktober 1994.